

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.Damanhuri H.R. 2007. *Segi-Segi Hukum Perjanjian kawin Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju.

Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Pers.

Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Aminuddin Ilmar, 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*, Makassar: Identitas Universitas Hasanuddin.

Bachtiar. 2015. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Djaja S. Meliala. 2012. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.

-----, 2006. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.

Gunawan Widjaya. 2005. *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (aanvullend recht) dalam Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

G.H.S. Lumban Tobing, 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ketiga, Jakarta: Erlangga.

Habib Adjie, 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Happy Susanto, 2008. *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Transmedia Pustaka.

H. Mahmudi Benyamin. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: staka Setia.

ti Natadimaj. 2009. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan n Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu.



Herlien Budiono. 2014. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

Indroharto, 1993. *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan.

J.E Sahetapy. 1995. *Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco*, Bandung.

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2002. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers.

Libertus Jehani. 2012. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*. Jakarta: Rana Pustaka.

-----, 2008, *Perkawinan Apa Risiko Hukumnya*, Jakarta: Forum Sahabat.

Lilik Mulyadi. 2009. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.

Martiman Prodjohamidjojo. 2004. *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.

-----, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing.

Maruarar Siahaan. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Revka Petra.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke-9. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

-----, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Atmosudirdjo, 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia onesia.



- Philipus M. Hadjon, 1998. *Penataan Hukum Administrasi*. Surabaya: Fakultas Hukum Unair.
- Rosnidar Sembiring. 2017. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Depok: Rajawali Pers.
- Ridwan, HR, 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim. 2017. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sirman Dahwal. 2017. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Suharnoko, 2004. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana.
- SF. Marbun, 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Syahrudin Nawi. 2013. *Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Tan Kamello dan Syariffah Lisa Andriati. 2011. *Hukum Orang dan Keluarga*. Medan: Usu Press.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan fiqh dan hukum positif)*, Yogyakarta: Teras.
- Wahyono Darmabrata. 2008. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*. Jakarta: Rizkita.
- Zainuddin Ali. 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar

afika.

ang-Undang

k Wetboek



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

C. Jurnal

Adriana Dwi Hardjanti. 2018. *Tinjauan Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 Terhadap Penyitaan Harta Penanggung Pajak Orang Pribadi Oleh Direktorat Jenderal Pajak*. Simposium Nasional Keuangan Negara. Jakarta Barat.

Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996

Fhauzi Prasetyawan, *Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, *Justitia Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sirabaya, Volume 2 Nomor 1 April 2018.

Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno. 2018. *Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian kawin Bagi Para Pihak (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta)*. *Privat Law* Vol. VI No 2 Juli - Desember 2018.

Atmadje, *Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, dalam *Notaries Edisi Januari-Februari*, 2017



Jan Michael Otto. 2012. *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*” dalam buku *Kajian Sosio-Legal*, Sulistyowati Irianto dkk (editor). Pustaka Larasan bekerjasama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen.

Oken Shahnaz Pramasantya, *Perjanjian kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Jurnal Ckarawala Hukum, Vol.8 Nom 2 Desember 2017

Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya

Susisusanti G. Pakaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dengan Akta Perjanjian Kawin*, Jurnal Ilmu Hukum, 2016, Edisi 2 Volume 4

Sri Turatmiah, Arfianna Novera, dan Annalisa Y, *Kedudukan Hukum Perjanjian kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Volume 16 Nomor 1

Uswatun Hasana, *“Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian kawin (prenuptial agreement) Pasca Putisan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XIII/2015”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017

D. Skripsi/Tesis

Amnawaty. 2009. Skripsi. Hukum Dan Hukum Islam. Bandar Lampung. Universitas Lampung.

Candra Hadi Kusuma. 2016. Kedudukan Hukum Perjanjian kawin Pasca Putusan Setelah Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUUXIII/2015). Tesis. Magister Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Islam Malang.



Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno. 2018. Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian kawin Bagi Para Pihak (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta). Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota*. Disertasi, PPS Fisip UI, Jakarta, 2002.

Herlina Lie. 2017. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga pada Perjanjian kawin Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015. Tesis. Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin.

